



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.2.1 – 6180 TAHUN 2022
TENTANG**

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 900);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023.
- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Prosundagri Tahun 2023, dengan jumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Prosundagri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. 2 (dua) Rancangan Undang-Undang
 - b. 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - c. 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden; dan
 - d. 32 (tiga puluh dua) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Prosundagri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tidak tercantum dalam Prosundagri Tahun 2023 dapat dilakukan jika merupakan:
- a. perintah dari peraturan perundang-undangan yang diundangkan setelah Prosundagri ditetapkan;
 - b. prolegnas daftar kumulatif terbuka; dan
 - c. akibat keluarnya putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi,
- setelah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KELIMA : Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tidak tercantum dalam Prosundagri Tahun 2023 dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM : Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat dilakukan pembahasan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Prosundagri Tahun 2023 diikuti dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Unit Kerja pemrakarsa dengan Direktorat/Pusat/Biro penanggungjawab menyampaikan jadwal pembahasan pada bulan Januari 2023 dan menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan paling lama pada tanggal 31 Desember 2023.

KESEMBILAN : Unit Kerja pemrakarsa dengan Direktorat/Pusat/Biro penanggungjawab menyampaikan laporan pertriwulan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Prosundagri Tahun 2023 kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pli. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.2.1 – 6180 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

I. SEKRETARIAT JENDERAL

A. BIRO PERENCANAAN :

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri		√	Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022	Kebutuhan	Bagian Perencanaan Program	B11

B. BIRO KEPEGAWAIAN :

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri.		√		Kebutuhan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017	Bagian Disiplin dan Penghargaan	B08
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri		√		Luncuran Prosun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018	Bagian Pengembangan Karier	B07

3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penilaian Kinerja	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	Luncuran Prosun 2022	Bagian Pengembangan Karier	B06
----	--	-------------------	---	--	--	----------------------	----------------------------	-----

C. BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA : -

D. PUSAT DATA DAN INFORMASI

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	✓			Kebutuhan		B10
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	✓			Kebutuhan		B10

E. BIRO HUKUM

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri	✓				Kebutuhan Tahunan	Bagian Perundang-undangan	B06
F. BIRO KEUANGAN DAN ASET :-									
G. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN :-									
H. BIRO UMUM :-									
I. PUSAT PENERANGAN :-									
J. PUSAT FASILITASI KERJA SAMA :-									
Keterangan RUU :- RPP :- RPerpres :- RPMDN : 7 (tujuh)									

II. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	2	3	Baru 4	Ubah 5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Asing		√	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013		Direktorat Ormas	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik		√		Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018	Direktorat Politik Dalam Negeri	B11
Keterangan								
RUU	:	-						
RPP	:	1 (satu)						
RPerpres	:	-						
RPMDN	:	1 (satu)						

III. DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan Nama Kabupaten Puncak Menjadi Kabupaten Puncak Papua	√		Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		Direktorat Topobad Subdit Toponimi II	B09

Keterangan
RUU : -
RPP : 1 (satu)
RPerpres : -
RPMDN : -

IV. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Undang-Undang	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus		√	Pasal 41 Undang-Undang		Direktorat Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD	B11

[illegible]

RPerpres : 1 (satu)
RPMDN : 2 (dua)

V. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	√			Tahunan	Direktorat PELPD	B04

Keterangan
RUU :
RPP :
RPerpres :
RPMDN : 1 (satu)

VI. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa		√		Luncuran Prosun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014	Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perencanaan Pembangunan di Desa	√			Luncuran Prosun 2022 Mencabut dan Mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014	Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama	B11

VII. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		✓	Penyesuaian Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah		Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	✓		Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Tahunan	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	B06
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023	✓		Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Tahunan	Direktorat Pendapatan Daerah	B06
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah		✓	Luncuan Prosun 2022	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri	Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	B09

	tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				Nomor 11 Tahun 2017	
--	--	--	--	--	------------------------	--

Keterangan
RUU :
RPP : 1 (satu)
RPerpres :
RPMDN : 3 (tiga)

VIII. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Undang- Undang	Administrasi Kependudukan	√				Direktorat Pendaftaran Penduduk	B12
2.	Rancangan Peraturan Presiden	Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional		√			Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	B09

3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak	✓				Direktorat Pendaftaran Penduduk	B08
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi	✓				Direktorat Pendaftaran Penduduk	B08
5.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	✓		Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 102 Tahun 2019		Direktorat FPD2K	B08
6.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	✓		Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019		Direktorat Pendaftaran Penduduk	B08
7.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pelaporan dan Pencatatan Kematian	✓				Direktorat Pencatatan Sipil	B08

8. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	✓			Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B08
---	--	---	--	--	--	-----

Keterangan
RUU : 1 (satu)
RPP :-
RPerpres : 1 (satu)
RPMDN : 6 (enam)

IX. INSPEKTORAT JENDERAL

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Perakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		✓		Luncuran Prosun 2022	Sekretariat Inspektorat Jenderal	B09

2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	✓		Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Tahunan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	B08
Keterangan RUU : - RPP : 1 (satu) RPerpres : - RPMDN : 1 (satu)								

X. BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		✓	Pasal 283 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		✓	Pasal 374 ayat (2) huruf i Undang-Undang		Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	B11

				Nomor 23 Tahun 2014		
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	√		Kebutuhan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016	Sekretariat Badan Litbang B11

Keterangan
RUU : -
RPP : -
RPerpres : -
RPMDN : 3 (tiga)

XI. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	√			Mencabut dan Mengganti Peraturan Menteri	Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	B11

XII. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/ Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	√			Kebutuhan	Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan	B08

Keterangan
RUU : -
RPP : -
RPerpres : -
RPMDN : 1 (satu)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Umum

